LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
(LPPD)
TAHUN 2021

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN LAMONGAN

JL. VETERAN NO.45 LAMONGAN

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah dan petunjukNya sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 dapat terselesaikan.

Tujuan disusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 adalah merupakan Bahan Laporan Program dan kegiatan pembangunan yang memberikan arah kebijakan, strategi pembangunan khususnya di bidang kebencanaan di Kabupaten Lamongan

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat diperlukan demi penyempurnaannya. Selanjutnya kami berharap bahwa LPPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 bisa dijadikan salah satu bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tentang Pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana di Kabupaten Lamongan.

Lamongan, Februari 2022

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

GUNADI,S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650403 198603 1 030

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.1.1 Penjelasan Umum

A. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah yang selanjutnya disebut LPPD adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah. LPPD Kabupaten/Kota disampaikan oleh Bupati/WaliKota kepada Menteri melalui Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 13 tahun 2019 tentang LPPD, Ruang lingkup LPPD mencakup penyelengaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum Pemerintahan. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamongan mengacu kepada peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi (Berita Negara Tahun1950);
2. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negarayang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No.75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3851);
3. Peraturan Pemerintah No. 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
4. Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No.47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4286);
5. Undang–undang No. 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.53,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4389);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuanganantara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 No.126, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesiaNo.4438);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamongan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PERDA Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah KabupatenLamongan;
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Lamongan.

B. Data Geografis Wilayah

Keadaan Geografis kabupaten Lamongan 6 51’ 54” sampai dengan 7 23’ 6” lintang selatan dan diantara garis bujur timur 112 4’ 41” sampai 112 33’ 12” bujur timur. Kabupaten Lamongan memiliki luas wilayah kurang lebih 1.812,80 km setara 181,280 ha atau 3.78 % dari luas wilayah Propinsi Jawa Timur.

Wilayah kabupaten Lamongan terdiri dari dataran rendah dan bonorowo serta pegunungan kapur, dengan tingkat ketinggian 0-25 meter seluas 50,17% sedangkan ketinggian 25-100 meter seluas 45,68% selebihnya 4,15% berketinggian diatas

100% meter di atas permukaan air laut, dan memiliki panjang garis pantai sepanjang 47km, batas wilayah administrasi Kabupaten Lamongan adalah :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Laut Jawa
- SebelahTimur : Berbatasan dengan Kabupaten Gresik
- Sebelah Selatan : Berbatasan DenganKab. Jombang dan Kab. Mojokerto
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kab. Bojonegoro dan Kab. Tuban

Wilayah Kabupaten Lamongan dibelah oleh Bengawan Solo dan secara garis besar datarannya dibedakan menjadi tiga karakteristik yaitu :

1. Bagian Tengah selatan merupakan dataran rendah yang relatif subur yang membentang dari kecamatan Kedungpring, Babat, Sukodadi, Pucuk,Lamongan, Deket, Tikung, Sugio, Maduran, Sarirejo Dan Kembangbahu.
2. Bagian selatan dan Uta merupakan pegunungan Kapur berbatu- batu dengan kesuburan sedang.
3. Bagian tengah utara merupakan bonorowo yang merupakan daerah rawan banjir, kawasan ini meliputi kecamatan sekaran, Laren, Karanggeneng, Kalitengah, Turi Karangbinangun, dan Glagah.

a. Kondisi tata guna Tanah Kabupaten Lamongan

Tabel 1

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas	Prosentase
1.	Pemukiman	13.030,00	7,16 %
2.	Sawah Irigasi	45.841,00	25,19 %
3.	Sawah tadah hujan	33.479,00	18,40 %
4.	Perkebunan	9.919,14	5,45 %
5.	Hutan	33.717,30	18,53 %
6.	Hutan Rakyat	7.098,10	3,90 %
7.	Tambak	1.380,05	0,76 %
8.	Sungai	8.760,00	4,81 %
9.	Waduk	8.719,00	4,79 %
10.	Tegalan/Ladang	12.838,91	7,06 %
11	Pertambangan	1.200,00	0,66 %
12	Peruntukan Lainnya (rawa, tanah tandus dll)	5.997,00	3,30 %
	Jumlah	181.980,03	100 %

b. Kondisi Topografi Kabupaten Lamongan

Kondisi topografi kabupaten Lamongan dapat ditinjau dari ketinggiuan wilayah diatas permukaan laut dan kekeringan lahan Kabupaten Lamongan terdiri dariu daratan rendah dan berawa dengan ketinggian 0 – 20 m dengan luas 50,17 % dari luas Kabupaten Lamongan, dataran ketinggian 25 – 100 m seluas 45,68 % dan sisanya 4,15 % merupakan daratan dengan ketinggian 100 m

c. Kondisi klimatologi Kabupaten Lamongan

Aspek klimatologi ditinjau dari kondisi suhu dan curah hujan.

Keadaan iklim di kabupaten Lamongan merupakan iklim tropis yang dapat dibedakan atas 2 (dua) musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau.

Curah hujan tertinggi pada bulan Desember sampai dengan Bulan Mei, sedangkan pada bulan-bulan lain curah hujan relative rendah rata-rata curah hujan setiap tahunnya hasil pemantauan 25 stasiun pengematan hujan tercatat sebanyak 1.403 mm dan hari hujan tercatat 71,16 %.

d. Hidrologi Kabupaten Lamongan

Kabupaten Lamongan di lewati oleh 3 (tiga) sungai besar yaitu :

1. Sungai bengawan solo sepanjang ± 68 km
2. Sungai/kali Blawi sepanjang ± 33 km
3. Sungai/kali Lamong sepanjang ± 32 km

e. Wilayah rawan bencana alam di Kabupaten Lamongan

1. Wilayah rawan bencana di kabupaten Lamongan sebagian besar karena adanya wilayah yang mempunyai ketinggian 0 – 7 meter diatas permukaan laut
2. Dengan ketinggian tersebut berpotensi rawan terhadap resiko banjir/tergenang.
3. Lokasi wilayah rawan terhadap resiko banjir adalah pada kecamatan yang dilalui sungai Bengawan Solo dan kecamatan yang berada pada posisi bengawan jero, lokasi Kecamatan yang dimaksud adalah Kecamatan Babat, Maduran, Karanggeneng, Laren, Kalitengan, Turi, Karangbinangun, Glagah dan Deket.

C. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat structural dan fungsional

1) Dilihat dari Tingkat Pendidikan

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai yang masuk Urusan ketentaman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Menurut Tingkat Pendidikan

No	Uraian	Jenjang Pendidikan							
		SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2
1	BPBD	0	0	3	0	0	0	8	9
Jumlah		**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**8**	**9**

2) Dilihat dari Pangkat dan Golongan

Tabel 1.2

Jumlah Pegawai yang Masuk dalam Urusan ketentaman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Menurut Pangkat dan Golongan

No	Uraian	Golongan			
		I	II	III	IV
1	BPBD	0	1	14	4

3) Diliihat dari Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Tabel 1.3

Jumlah Pegawai yang Masuk Dalam Urusan ketentaman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Menurut Jabatan

No	Uraian	Golongan								Staf	Fungsional
		II/c	II/d	III/A	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/c		
1	BPBD	2	1	1	2	4	5	4	1	6	13

D. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan dalam rangka penanggulangan bencana di Kabupaten Lamongan tahun 2021 didukung alokasi anggaran sebagai berikut :

Perangkat Daerah Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	**3.937.417.248**	**3.685.935.211**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.000.000	32.000.000
Koordinasi dan Penyusunan	22.000.000	22.000.000

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.000.000	21.983.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.552.295.548	2.518.399.958
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.800.000	10.798.500
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15.000.000	14.997.150
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	0
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000	4.988.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000	24.899.700
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.096.000	20.109.900
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	10.890.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55.000.000	21.351.262
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listri	102.500.000	64.773.657
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000	20.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	496.064.000	456.126.984
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Dearah		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	31.266.000	20.495.600
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	58.086.000	33.300.800
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.758.000	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	126.500.00	125.550.000
PROGRAM PENAGGULANGAN BENCANA		
Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		

Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	95.000.000	94.105.000
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	10.000.000	0
Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	20.000.000	19.022.000
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	20.000.000	20.000.000
Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	10.038.500	9.466.400
Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	15.000.000	14.883.000
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	10.000.000	10.000.000
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	70.000.000	70.000.000
Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	14.999.850	14.999.850
Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		
Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	40.013.350	36.590.100

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

1. Strategi
   - Membangun kemitraan antar stakeholder / pihak-pihak terkait dalam penanggulangan bencana (kerjasama dengan LPBI NU, PMI, RAPI, ORARI, SAR, Komunitas peduli kemanusiaan dll)
   - Membangun kesadaran kolektif masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana (kerjasama dengan swasta/pengusaha)
   - Membangun kerjasama lintas sektoral dalam penanganan penanggulangan bencana (pembentukan posko bersama penanganan bencana)

2. Kebijakan
   - Terselenggaranya penanggulangan bencana yang terencana, terarah, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh serta akuntabel.
   - Meningkatnya kesadaran, kemampuan, dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui pembentukan tim reaksi cepat (TRC) penanggulangan bencana.
   - Terselesaikannya penanganan kedaruratan korban bencana di wilayah pascabencana secara cepat, tepat, efektif serta terkoodinir/ terpadu.
   - Terselesaikannya pemulihan sarana dan prasarana fisik dan nonfisik di wilayah pascabencana secara terpadu dan menyeluruh
     Peningkatan tertib administrasi perkantoran.

B. Visi dan Misi

VISI RPJMD Kab. Lamongan, MISI Ke 3,TUJUAN DAN SASARAN

VISI RPJMD Kab. Lamongan

Dalam rangka menjabarkan dan melaksanakan visi Kabupaten Lamongan serta mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan, maka BPDB Mengsuseskan Visi dan Misi Kab. Lamongan yang visinya sebagai berikut :

“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”

MISI Ke 3 RPJMD Kab. Lamongan

Untuk mendukung dan mewujudkan visi ebagaimana tersebut diatas, Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lamongan mengemban Misi Ke 3 RPJMD sebagai berikut :

1. Memantapkan Sarana dan Prasarana Dasar Dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan :

TUJUAN

- Mewujudkan Peningkatan Konservasi Lingkungan dan Pengendalian Lingkungan.

SASARAN

- Terwujudnya Masyarakat Yang Tangguh Bencana
- Terwujudnya Penanganan Darurat bencana Yang Cepat dan Tepat
- Terwujudnya Pemulihan Masyarakat dan Sarpras Yang Lebih Baik

C. Program Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Badan Penanggulangan Bencana DaerahKabupatenLamongan berkedudukan sebagai unsur Pendukung tugas Kepala Daerah yang dipimpin oleh Seorang Kepala Pelaksana berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan mempunyai tugas melaksanakan penyusunandan pelaksanaan kebijakan Daerah di Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Untuk tercapainya penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah diBidang Penanggulangan Bencana yang sudah dituangkan pada ketentuan Renstra tahun 2016-2021,Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan membuat kebijakan-kebijakan dan menyusun program kerja antara lain:

a. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam
b. Program Penanganan tanggap Darurat;
c. Program Rehabilitasi dan rekontruksi;

D. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Adapun Kegiatan yang disusun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan berdasarkan program Kerja yang telah direncanakan antara lain:

A. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

1. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
2. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per jenis Bencana

B. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

1. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
2. Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota
3. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota

C. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

1. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
2. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
3. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korba
4. n Bencana Kabupaten/Kota
5. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

D. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

1. Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan minimal yang sesuai dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Lamongan yaitu :

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
a. Pelayanan Informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap Tahun
b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap Tahun
c. Pelayanan Penyelamatan	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi	100%	Setiap Tahun

dan Evakuasi Korban Bencana	korban bencana		

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Tabel2.1.1

Capaian Kinerja Makro

NO	Indikato Kinerja Makro	Capaian KinerjaTahunN-1	Capaian Kinerja TahunN	Perubahan (%)
		NIHIL		

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Tabel 2.2

Capaian Kinerja ketentaman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

No	Sasaran	Indikator		satuan	Target RPJMD 2021	REALISASI		Perkembangan
						Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Terwujudnya Pengendalian Bencana Alam	1	Presentase Desa Tangguh Bencana	%	91,55%	74,64%	97,44%	22,8%

Keterangan :

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan urusan Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Lingkup Bidang Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut :

1) Presentase Desa Tangguh pada tahun 2021 realisasi 97,44%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 91,55%. Sehingga tahun 2021 capaian target kinerja 106%, 22 Desa Tangguh yang telah dilaksanakan :

- Kecamatan Laren (10 Desa)
  - Desa Tamanprijek
  - Desa Pesanggrahan
  - Desa Karangwungulor
  - Desa Siser
  - Desa Karangtawar
  - Desa Gelap

- Desa Gempangsejati
- Desa Dateng
- Desa Godog
- Desa Tejoasri

- Kecamatan Maduran (6 Desa)
  - Desa Duriwetan
  - Desa Blumbang
  - Desa Gedangan
  - Desa Jangkungsomo
  - Desa Siwuran
  - Desa Klagensrampat

- Kecamatan Karanggeneng (1 Desa)
  - Desa Kaligerman

- Kecamatan Karangbinangun (5 Desa)
  - Desa Waruk
  - Desa Somowinangun
  - Desa Banyuurip
  - Desa Ketapangtelu
  - Desa Banjarejo

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kententraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 1. Persentase Penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal Kemajuan pekerjaanDokumen -------- ---------- X 100 % Jumlah satu dokumen KRB yang Lengkap dan sudah disahkan 1 ----------x100% = 1	100%	BPBD	
		2. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100%	BPBD	

		Jumlah penduduk dimkawasan Rawan bencana yang memperoleh Informasi rawan bencana sesuai Jenis ancaman bencana ---------- X 100 % Seluruh penduduk dikawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana 558.635 ----------x100% = 558.635			
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 1. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal Kemajuan pekerjaan dokumen Yang disusun -------- ---------- X 100 % Jumlah satu dokumen RPB yang Lengkap dan sudah di sahkan 1 ----------x100% = 1	100%	BPBD	
		2. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal Kemajuan pekerjaan dokumen Yang disusun -------- ---------- X 100 % Jumlah satu dokumen renkon yang Lengkap dan sudah di sahkan 1 ----------x100% = 1	100%	BPBD	
		3. Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan Jumlah aparatur dan warga negara Yang ikut pelatihan ---------- X 100 % Jumlah aparatur dengan warga negara Di Kawasan rawan bencana 287.524 ----------x100% = 558.635	51,46%	BPBD	
		4. Persentase jumlah warga negara yang ikut pelatihan Jumlah warga negara Yang ikut pelatihan -------- ---------- X 100 % Jumlah warga negara Di Kawasan rawan bencana 287.444 ----------x100% = 558.635	51,45%	BPBD	
		5. Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan	64,06%	BPBD	

		sarana prasarana penanggulangan bencana Jumlah warga negara Yang mendapat layanan pusdalop ---------- X 100 % Jumlah warga negara yang berda di kawasan rawan bencana 357.868 ----------x100% = 558.635			
		6. Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan Jumlah warga negara Yang mendapat layanan peralatan perlindungan -------- ---------- X 100 % Jumlah warga negara yang berda di kawasan rawan bencana 558.635 ----------x100% = 558.635	100%	BPBD	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 1. Persentase Kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB Jumlah Kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB -------- ---------- X 100 % Jumlah Seluruh penetapan status KLB	1	**1**	
		2. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana Jumlah Kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana -------- ---------- X 100 % Jumlah Seluruh penetapan status darurat bencana 58 Kejadian -------- X 100 %= 58 Kejadian	100%	BPBD	
		3. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana Jumlah Petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana -------- ---------- X 100 % Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana 43 ----------x100% = 43	100%	BPBD	
		4. Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi	100%	BPBD	

		terhadap kejadian bencana Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi -------- ---------- X 100 % Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana 391.516 ----------x100% = 391.516			
	Perumahan Rakyat Kabupaten/Kota	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota 1. Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	54.062	BPBD	
		2. Jumlah rumah yang terkena bencana alam	8.877	BPBD	
		3. Jumlah Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	33.647	BPBD	
		4. Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	6	BPBD	
		5. Jumlah unit rumah korban bencana yang di bangun kembali sesuai dengan rencana aksi	-	perkim	
		6. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	-	perkim	
		7. Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	-	perkim	
		8. Jumlah RT, KK dan jiwa korban bencana yang terfasilitasi	33,647	BPBD	
		9. Jumlah luasan dan lokasi pencadangan lahan	-	perkim	

2.2.3 Indikator Kinerja Hasil

	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian	Sumbe	Ketera

	Pemerintahan		Kinerja	r Data	ngan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kententraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Informasi rawan bencana ---------- X 100 % Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana di wilayah kabupaten 558.635 ----------x100% = 558.635	100%	BPBD	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana -------- ---------- X 100 % Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana di wilayah kabupaten 287.644 ----------x100% = 558.635	51.49 %	BPBD	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana -------- ---------- X 100 % Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana di wilayah kabupaten 391.516 ----------x100% = 558.635	70.08%	BPBD	
	Perumahan Rakyat Kabupaten/Kota	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/Kota Jumlah Unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n ---------- X 100 % Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n 6 ---- X 100 %= 6	100%	BPBD	

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

A. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Akuntabilitas kinerja merupakan suatut atanan, instrumen, dan metode perwujudan capaian keberhasilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pelaksanaan visi dan misi secara terukur dan periodik agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktik-praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).Perwujudan pertanggungjawaban ini kemudian disusun dan disampaikan dalam bentuk laporan yang disebut Laporan Akutanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP) yang memuat:

a. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indicator kinerja .Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerjaterukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Untuk dapat mengukur sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan, ditentukan indicator pencapaian atau yang disebut dengan target kinerja.Target-target kinerja ditentukan diawal tahun perencanaan. Adapun rincian kegiatan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 diantaranya:

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Terwujudnya masyarakat yang Tangguh Bencana	Prosentase Peningkatan Kemampuan Komunitas Masyarakat Tentang Kebencanaan di Daerah Rawan Bencana	91,44%
2	Terwujudnya Penanganan Darurat Bencana yang Cepat dan Tepat	Prosentase penanganan Bencana yang Cepat Ditangani Dengan Cepat dan Tepat	100%
3	Terwujudnya Pemulihan Masyarakat dan Sarpras yang lebih baik	Prosentase Kerusakan Akibat Bencana Yang Telah Direhabilitasi sesuai dengan SOP	100%

Bidang Pecegahan dan Kesiapsiagaan
Kepala Bidang Pecegahan dan Kesiapsiagaan

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Terwujudnya Masyarakat yang tangguh bencana	Rasio Peningkatan Kemampuan Komunitas Masy. Tentang kebencanaan di daerah Rawan Bencana	100%

Seksi Pencegahan

No	Sasaran	Indikator	Target
1.	Pemahaman dan peningkatan kualitas masyarakat tentang desa tangguh	Terbentuknya desa tangguh bencana	22 Desa

Seksi Kesiapsiagaan

No	Sasaran	Indikator	Target
1.	Meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman bencana	Terlaksananya Jaga Posko	60 Hari
2	Penyediaan Informasi tentang potensi bencana yang ada di Kab. Lamongan	Tersusunya Dokumen Kajian Risiko Bencana	1 Dokumen
		Presentase Sosialisasi Perangkat Desa	100%

Bidang Kedaruratan dan Logistik
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Terwujudnya Penanganan Darurat Bencana yang cepat dan tepat.	Prosentase penanganan bencana yang ditangani dengan cepat dan tepat	100%

Seksi Tanggap Darurat

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Terlaksananya Penanganan darurat bencana yang cepat dan tepat	Jumlah Peserta Pelatihan	4 orang
		Jumlah Koordinasi dan Tersedianya BBM	1 Tahun
		Presentase Koordinasi dan penanganan bencana	100%
		Aktivasi Posko darurat bencana	45 hari

Seksi Logistik

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Terlaksananya	Presentase Bantuan	100%

	Penanganan darurat bencana yang cepat dan tepat	Masyarakat yang terdampak bencana	

Bidang Rekontruksi dan Rehabilitasi
Kepala Bidang Rekontruksi dan Rehabilitasi

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Terwujudnya Pemulihan masyarakat dan sarpras yang lebih baik	Prosentase kerusakan akibat bencana yang telah direhabilitasi sesuai dengan SOP	100%

Seksi Rehabilitasi

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya pelaksanaan penilaian kerusakan dan kerugian Pasca Bencana	Jumlah Regulasi pengkajian kebutuhan pasca bencana	1 Aturan/Dokumen

Seksi Rekontruksi

No	Sasaran	Indikator	Target
1.	Meningkatnya pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pasca bencana	Jumlah Bantuan Bahan Bangunan Pasca Bencana, Jumlah Laporan Monev, Jumlah Pelaksanaan Monev Pasca Bencana	1 Paket, 1 Laporan, 10 Kali

B. Pengukuran capaian kinerja Tahun 2021

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah dengan melakukan pengukuran kinerja secara berkala dalam rangka menjamin adanya peningkatan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi dengan kinerja yang diharapkan.Adapun capaian pengukuran kinerja berdasarkan perjanjian kinerja Tahun 2021,yaitu:

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya masyarakat yang Tangguh	Rasio peningkatan kemampuan komunitas masyarakat tentang	91,55%	97,44%	106%

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
	Bencana	kebencanaan di daerah rawan bencana			
2	Terwujudnya Penanganan Darurat Bencana yang Cepat dan Tepat	Persentase Penanganan bencana yang ditangani dengan cepat dan tepat	100%	100%	100%
3	Terwujudnya Pemulihan Masyarakat dan Sarpras yang lebih baik	Persentase kerusakan akibat bencana yang telah direhabilitasi sesuai dengan SOP	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas, realisasi kinerja Tahun 2021 telah mencapai target yang ditentukan sebelumnya. Adapun rincian Indikator adalah sebagai berikut:

a) Prosentase Peningkatan Kemampuan Komunitas Masyarakat Tentang Kebencanaan di Daerah Rawan Bencana

Prosentase Peningkatan Kemampuan Komunitas Masyarakat Tentang Kebencanaan di Daerah Rawan Bencana yang diselesaikan memiliki target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan Tahun2016-2021. Target Prosentase Peningkatan Kemampuan Komunitas Masyarakat Tentang Kebencanaan di Daerah Rawan Bencana yang diselesaikan pada Tahun 2021 sebesar 91,55% dan telah terealisasi sebesar 97,44% sehingga telah mencapai target yang telah ditentukan dan memperoleh capaian sebesar 106%.

b) Prosentase penanganan Bencana yang Cepat Ditangani Dengan Cepat dan Tepat

Prosentase penanganan Bencana yang Cepat Ditangani Dengan Cepat dan Tepat yang diselesaikan memiliki target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021. Target Prosentase penanganan Bencana yang Cepat Ditangani Dengan Cepat dan Tepat yang diselesaikan pada Tahun 2021 sebesar 100 % dan telah terealisasi sebesar 100 % sehingga telah mencapai target yang telah ditentukan dan memperoleh capaian sebesar 100%.

c) Prosentase Kerusakan Akibat Bencana Yang Telah Direhabilitasi sesuai dengan SOP

Prosentase Kerusakan Akibat Bencana Yang Telah Direhabilitasi sesuai dengan SOP yang diselesaikan memiliki target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Lamongan Tahun 2016-2021. Target Prosentase Kerusakan Akibat Bencana Yang Telah Direhabilitasi sesuai dengan SOP yang diselesaikan pada Tahun 2021 sebesar 100 % dan telah terealisasi sebesar 100 % sehingga telah mencapai target yang telah ditentukan dan memperoleh capaian sebesar 100%.

Bidang Pecegahan dan Kesiapsiagaan
Kepala Bidang Pecegahan dan Kesiapsiagaan

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Masyarakat yang tangguh bencana	Rasio Peningkatan Kemampuan Komunitas Masy. Tentang kebencanaan di daerah Rawan Bencana	91,55%	97,44%	106%

Berdasarkan tabel diatas, realisasi kinerja Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Tahun 2021 telah mencapai target yang ditentukan sebelumnya. Prosentase Peningkatan Kemampuan Komunitas Masyarakat Tentang Kebencanaan di Daerah Rawan Bencana yang diselesaikan memiliki target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021. Target Prosentase Peningkatan Kemampuan Komunitas Masyarakat Tentang Kebencanaan di Daerah Rawan Bencana yang diselesaikan pada Tahun 2021 sebesar 91,55% dan telah terealisasi sebesar 97,44% sehingga telah mencapai target yang telah ditentukan dan memperoleh capaian sebesar 106%.

Seksi Pencegahan

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pemahaman dan peningkatan kualitas masyarakat tentang desa tangguh	Terbentuknya desa tangguh bencana	22 Desa	22 Desa	100%

Berdasarkan tabel diatas, realisasi kinerja Kepala Seksi Pencegahan Tahun 2021 telah mencap

Seksi Kesiapsiagaan

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman bencana	Terlaksananya Jaga Posko	60 Hari	60 Hari	100%,

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
2	Penyediaan Informasi tentang potensi bencana yang ada di Kab. Lamongan	Tersusunya Dokumen Kajian Risiko Bencana	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Presentase Sosialisasi Perangkat Desa	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas, Kepala seksi kesiapsiagaan mempunyai target jaga posko 60 hari dan terealisasi jaga posko selama 60 hari, sehingga telah mencapai target yang telah ditentukan dan memperoleh capaian sebesar 100%,

Bidang Kedaruratan dan Logistik
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Penanganan Darurat Bencana yang cepat dan tepat.	Prosentase penanganan bencana yang ditangani dengan cepat dan tepat	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas, realisasi kinerja Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Tahun 2021 telah mencapai target yang ditentukan sebelumnya. Prosentase penanganan Bencana yang Cepat Ditangani Dengan Cepat dan Tepat yang diselesaikan memiliki target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021. Target Prosentase penanganan Bencana yang Cepat Ditangani Dengan Cepat dan Tepat yang diselesaikan pada Tahun 2021 sebesar 100 % dan telah terealisasi sebesar 100 % sehingga telah mencapai target yang telah ditentukan dan memperoleh capaian sebesar 100%.

Seksi Tanggap Darurat

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Terlaksananya Penanganan darurat bencana yang cepat dan tepat	Jumlah Peserta Pelatihan	4 orang	4 orang	100%
		Jumlah Koordinasi dan Tersedianya BBM	1 Tahun	1 Tahun	100%
		Presentase Koordinasi dan penanganan bencana	100%	100%	100%
		Aktivasi Posko darurat bencana	45 hari	45 hari	100%

Berdasarkan tabel diatas, realisasi kinerja Kepala Seksi Tanggap Darurat Tahun 2021 telah mencapai target yang ditentukan sebelumnya.

Seksi Logistik

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Terlaksananya Penanganan darurat bencana yang cepat dan tepat	Presentase Bantuan Masyarakat yang terdampak bencana	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas, realisasi kinerja Kepala Seksi Tanggap Darurat Tahun 2021 telah mencapai target yang ditentukan sebelumnya.

Kepala Bidang Rekontruksi dan Rehabilitasi

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Pemulihan masyarakat dan sarpras yang lebih baik	Prosentase kerusakan akibat bencana yang telah direhabilitasi sesuai dengan SOP	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas, realisasi kinerja Kepala Bidang Rekontruksi dan Rehabilitasi Tahun 2021 telah mencapai target yang ditentukan sebelumnya. Prosentase kerusakan akibat bencana yang telah direhabilitasi sesuai dengan SOP yang diselesaikan memiliki target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021. Target Prosentase kerusakan akibat bencana yang telah direhabilitasi sesuai dengan SOP yang diselesaikan pada Tahun 2021 sebesar 100 % dan telah terealisasi sebesar 100 % sehingga telah mencapai target yang telah ditentukan dan memperoleh capaian sebesar 100%.

Seksi Rehabilitasi

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya pelaksanaan penilaian kerusakan dan kerugian Pasca Bencana	Jumlah Regulasi pengkajian kebutuhan pasca bencana	1 Aturan/Dokumen	1 Aturan/Dokumen	100%

Berdasarkan tabel diatas, realisasi kinerja Kepala Seksi Rehabilitasi Tahun 2021 telah mencapai target yang ditentukan sebelumnya.

Seksi Rekontruksi

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya pelaksanaan monitoring,	Jumlah Bantuan Bahan Bangunan Pasca Bencana,	1 Paket, 1 Laporan,	1 Paket, 1 Laporan,	100%

	evaluasi dan pelaporan pasca bencana	Jumlah Laporan Monev, Jumlah Pelaksanaan Monev Pasca Bencana	10 Kali	10 Kali	

Berdasarkan tabel diatas, realisasi kinerja Kepala Seksi Rekontruksi Tahun 2021 telah mencapai target yang ditentukan sebelumnya

C. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Terwujudnya masyarakat yang Tangguh Bencana	Prosentase Peningkatan Kemampuan Komunitas Masyarakat Tentang Kebencanaan di Daerah Rawan Bencana	100%	106%
2	Terwujudnya Penanganan Darurat Bencana yang Cepat dan Tepat	Prosentase penanganan Bencana yang Cepat Ditangani Dengan Cepat dan Tepat	100%	100%
3	Terwujudnya Pemulihan Masyarakat dan Sarpras yang lebih baik	Prosentase Kerusakan Akibat Bencana Yang Telah Direhabilitasi sesuai dengan SOP	100%	100%

Bidang Pecegahan dan Kesiapsiagaan
Kepala Bidang Pecegahan dan Kesiapsiagaan

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Terwujudnya Masyarakat yang tangguh bencana	Rasio Peningkatan Kemampuan Komunitas Masy. Tentang kebencanaan di daerah Rawan Bencana	100%	106%

Seksi Pencegahan

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Pemahaman dan peningkatan kualitas masyarakat tentang desa tangguh	Terbentuknya desa tangguh bencana	10 Desa	22 Desa

Seksi Kesiapsiagaan

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2020	Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Penyediaan Informasi tentang potensi bencana yang ada di Kab. Lamongan	Tersusunya Dokumen Kajian Risiko Bencana	-	1 Dokumen
		Presentase Sosialisasi Perangkat Desa	-	100%
2.	Meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman bencana	Terlaksananya Jaga Posko		60 hari

Bidang Kedaruratan dan Logistik
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Terwujudnya Penanganan Darurat Bencana yang cepat dan tepat.	Prosentase penanganan bencana yang ditangani dengan cepat dan tepat	100%	100%

Seksi Tanggap Darurat

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Terlaksananya Penanganan darurat bencana yang cepat dan tepat	Jumlah Koordinasi dan Tersedianya BBM	150 Tangki	4 orang
		Presentase Koordinasi dan penanganan bencana	15 Peralatan	1 Tahun
		Jumlah Peserta Pelatihan	4 Bulan, 1 Pelatihan	100%
		Aktivasi Posko darurat bencana	3 Bulan	45 hari

Seksi Logistik

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Terlaksananya Penanganan darurat bencana yang cepat dan tepat	Jumlah bantuan bahan banjiran yang diberikan kepada masyarakat terdampak bencana banjir, jumlah bantuan sembako yang diberikan kepada masyarakat	Bongkotan 636 Btg, Gedeng Guling 500 Mtr, Glangsing 15.000 lb, terpal 100 lb dan pasir urug 42 M3 dan 10000 Paket Sembako serta 5x	100%

		terdampak bencana	Pendistribusian	

Bidang Rekontruksi dan Rehabilitasi
Kepala Bidang Rekontruksi dan Rehabilitasi

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Terwujudnya Pemulihan masyarakat dan sarpras yang lebih baik	Prosentase kerusakan akibat bencana yang telah direhabilitasi sesuai dengan SOP	100%	100%

Seksi Rehabilitasi

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Meningkatnya pelaksanaan penilaian kerusakan dan kerugian Pasca Bencana	Jumlah Pelatihan Tim DaLA, Jumlah dokumen identifikasi kerusakan pasca bencana, Operasional tim DaLA, jumlah Dokumen Jitu Pasna, dan jumlah Bahan Bantuan Pasca Bencana	1 x Pelatiahan Tim DALA, 1 Dokumen Pasca Bencana, 3 Bulan, 1 Dokumen Jitu Pasna, 15 Paket	1 Paket, 1 Laporan, 10 Kali

Seksi Rekontruksi

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2019	Tahun 2020
1.	Meningkatnya pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pasca bencana	Jumlah Bantuan Bahan Bangunan Pasca Bencana, Jumlah Monitoring dan evaluasi PB, Jumlah Koordinasi Monitoring PB	6 Paket, 10 Dokumen, 10 x Koordinasi	1 Aturan/Dokumen

D. Pengukuran Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD/RENSTRA

Capaian Kinerja ketentaman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

No	Program	Indikator		satuan	Target RPJMD 2021	REALISASI		Perkembangan
						Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Terwujudnya Pengendalian Bencana Alam	1	Presentase Desa Tangguh Bencana	%	91,55%,	74,64%	97,44 %	22,8%

Keterangan :

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan urusan Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Lingkup Bidang Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut :

1) Presentase Desa Tangguh pada tahun 2021 realisasi 97,44%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 91,55%. Sehingga tahun 2021 capaian target kinerja 106%, 22 Desa Tangguh yang telah dilaksanakan :

- Kecamatan Laren (10 Desa)
  - Desa Tamanprijek
  - Desa Karangwungulor
  - Desa Karangtawar
  - Desa Gempangsejati
  - Desa Godog
  - Desa Pesanggrahan
  - Desa Siser
  - Desa Gelap
  - Desa Dateng
  - Desa Tejoasri
- Kecamatan Maduran (6 Desa)
  - Desa Duriwetan
  - Desa Gedangan
  - Desa Siwuran
  - Desa Blumbang
  - Desa Jangkungsomo
  - Desa Klagensrampat
- Kecamatan Karanggeneng (1 Desa)
  - Desa Kaligerman
- Kecamatan Karangbinangun (5 Desa)
  - Desa Waruk
  - Desa Banyuurip
  - Desa Banjarejo
  - Desa Somowinangun
  - Desa Ketapangtelu

E. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai

Realisasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2021 telah memenuhi target yang ditetapkan sebagaimana ditetapkan dalam indikator sasaran program kerja. Adapun faktor yang mendukung secara umum keberhasilan realisasi Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2021 antara lain :

(1) Tersedianya jumlah aparatur yang memadai sebagai pendukung pelaksanaan program kerja.

(2) Kualitas aparatur dilihat dari tingkat pendidikannya sudah cukup baik (rata-rata berpendidikan S1).

(3) Adanya struktur organisasi perangkat daerah dan pembagian tugas dari masing - masing bidang yang jelas.

(4) Adanya koordinasi dan kamunikasi yang terjalin baik diantara masing - masing bidang;

(5) Program kerja berpedoman pada Tupoksi yang jelas, SOP dan SPM serta petunjuk operasional yang dapat dipahami segenap aparatur;

(6) Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2021 yang berdedikasi dan memiliki integritas serta dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

F. Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja

A. Urusan ketentaman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Pelaksanaan urusan ketentaman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan yang dijabarkan dalam 2 Program, 9 Kegiatan dan 26 sub kegiatan dengan didukung dana sebesar Rp. 3.937.417.248 dan terealisasi sebesar Rp. 3.685.935.211atau 93,61%. Secara Umum capaian kinerja Urusan :

A ***Program*** **:** ***ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA***

Kegiatan **:** ***1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat***

Sub Kegiatan : 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dana 76.000.000

Realisasi 75.983.000

Keluaran 2 Dokumen Perencanaan
1 Dokumen Renstra
1 dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
3 Dokumen evaluasi

Kegiatan : 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Dana		2.578.095.548
Realisasi		2.518.399.958
Keluaran		Gaji dan tunjangan yang di terima pegawai BPBD 1 Dokumen laporan keuangan akhir tahun 1 laporan keuangan bulanan/semester
Kegiatan	**:**	**3. Administrasi Umum Perangkat Daerah**
Sub Kegiatan	:	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Dana		136.096.000
Realisasi		82.238.862
Keluaran		12 komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 11 peralatan rumah tangga alat tulis kantor 5 Banner 300 Cetak 58384 Fotokopi Hitam Putih bahan bacaan surat kabar 10 iklan dan 12 koran makan dan minuman rapat 3 Kali rapat koordinasi ke luar daerah 65 Orang/Kali
Kegiatan	**:**	**5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
Sub Kegiatan	:	1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Dana		618.564.000
Realisasi		540.900.641

Keluaran		4 Rekening yang terbayarkan peralatan dan perlengkapan yang dipelihara Gaji 23 TKk
Kegiatan	**:**	**6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
Sub Kegiatan	:	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Dana		223.610.000
Realisasi		179.346.400
Keluaran		Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan atau Dinas Jabatan Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
B Program	***:***	***PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA***
Kegiatan	**:**	**1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**
Sub Kegiatan	:	1) Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota 2) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana
Dana		105.000.000
Realisasi		94.105.000
Keluaran		1 Dokumen Kajian Risiko Bencana Sosisalisasi Perangkat Desa
Kegiatan	**:**	**2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**

Sub Kegiatan	:	1) Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 2) Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupten/Kota 3) Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota
Dana		50.038.500
Realisasi		48.488.400
Keluaran		60 Jaga Posko 4 Peserta Pelatihan 1 Paket Bantuan, 1 Dokumen, 10 Kali Monev
Kegiatan	**:**	**3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**
Sub Kegiatan	:	1) Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 2) Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 3) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 4) Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
Dana		109.999.850
Realisasi		109.882.850
Keluaran		285 Liter BBM Koordinasi dan Penanganan Bencana bantuan masyarakat yang terdampak bencana 45 hari aktivasi posko
Kegiatan	**:**	**4. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**
Sub Kegiatan	:	1) Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
Dana		40.013.350
Realisasi		35.590.100
Keluaran		1 Aturan/Dokumen

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Pada Tahun 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan memperoleh tugas pembantuan yang diperoleh oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dasar hukum tugas pembantuan adalah sebagai berikut :

1 Dasar Hukum

Kegiatan ekspedisi Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Tahun 2021 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penaggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Lamongan;
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 27 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan;

B. Gambaran Umum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada Kota dan/atau desa, serta dari pemerintah Kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi penugasan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta

membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa. Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerah dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas Pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah dan/atau desa akan lebih efisien dan efektif. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada Kota/kota dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kota/kota dan sebagian tugas pemerintahan di bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh Kota/kota. Upaya pemerintah untuk melaksanakan pembangunan yang bermuara kepada kesejahteraan rakyat semakin meningkat. Penyerahan wewenang urusan pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem desentralisasi merupakan salah satu upaya untuk mempercepat proses pembangunan di daerah. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamatkan bahwa Pemerintahan Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan. pelaksanaan kepada yang menugaskan. Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan setelah adanya penugasan pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga kepada Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota) atas beban APBN.

C. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan

Pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan dan Urusan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 merupakan implementasidari DIPA Tugas Pembantuan Kementerian/Lembaga dengan mengacu pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (Juklak/juknis) masing-masing program/kegiatan yang dialokasikan untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan. Realisasi kegiatan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan menjadi gambaran tentang tingkat capaian kinerja kegiatan Tugas Pembantuan dan Urusan . Pengukuran tingkat capaian kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran kegiatan dan anggaran menurut program/kegiatan Tugas Pembantuan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran (goals and objectivies). Kinerja kegiatan dan sasaran merupakan ukuran tingkat capaian indikator kinerja yang dicapai pada kegiatan

dan sasaran. DIPA Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021, telah menjabarkan indikator kinerja output dan input sebagai basis kuantitaif pengukuran kinerja program/kegiatan dan anggaran. Dengan mengacu kepada pedoman pengukuran dan evaluasi kinerja oleh LAN, dimana nilai capaian kinerja merupakan angka yang menunjukkan perbandingan antara kinerja nyata (realisasi/capaian) dengan kinerja yang direncanakan (target), secara umum tergambar kegiatan-kegiatan yang direncanakan sudah mencapai target. Apabila dibandingkan antara capaian pada tolak ukur input yang menggunakan indikator mengenai besarnya dana, secara rata-rata akan tergambar bahwa nilai capaian input sebanding dengan nilai capaian pada tolok ukur output dan outcome-nya. Ditinjau secara simultan hasil penilaian terhadap kinerja kegiatan Tugas Pembantuan dan Urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 menunjukkan bahwa nilai capaian kinerja pelaksanaan kegiatannya berdasarkan tolok ukur dan target kinerja mencapai kisaran 70% –100%, sehingga dengan kondisi ini dapat diinterpretasikan, bahwa pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan dapat digolongkan sebagai kriteria berhasil. Meskipun demikian, nilai kinerjanya mencapai 100 %. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa terdapat efisiensi input dalam pencapaian output. Sehingga tingkat efisiensi mencapai 100%, yang artinya bahwa terdapat efisensi input dalam pencapaian output sebagai dasar penentuan kerangka perencanaan anggaran. Secara lebih rinci mengenai capaian kinerja kegiatan yang disandingkan dengan target kinerjanya.

Kegiatan-kegiatan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan merupakan pelaksanaan dari program/kegiatan dari Kegiatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang lokasi dan peruntukannya di Kabupaten Lamongan. Realisasi kegiatan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan menjadi gambaran tentang tingkat capaian kinerja kegiatan Tugas Pembantuan. Pengukuran tingkat capaian kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran kegiatan dan anggaran menurut program/kegiatan Tugas Pembantuan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran (goals and objectivies).Kinerja kegiatan dan sasaran merupakan ukuran tingkat capaian indikator kinerja yang dicapai pada kegiatan dan sasaran. DIPA Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021 telah menjabarkan indikator kinerja output dan input sebagai basis kuantitaif pengukuran kinerja program/kegiatan dan anggaran. Dengan mengacu kepada pedoman pengukuran dan evaluasi kinerja oleh

LAN, dimana nilai capaian kinerja merupakan angka yang menunjukkan perbandingan antara kinerja nyata (realisasi/capaian) dengan kinerja yang direncanakan (target), secara umum tergambar kegiatan-kegiatan yang direncanakan sudah mencapai target. Meskipun demikian, nilai kinerjanya mencapai100 %.. Secara lebih rinci mengenai capaian kinerja kegiatan yang disandingkan dengan target kinerjanya

3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

Tugas pembantuan dapat juga diartikan sebagai tugas pemerintah daerah untuk mengurusi urusan pemerintahan pusat atau pemerintah yang lebih tinggi, dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskannya. Pemerintah pusat dalam hal ini berwenang dan berkewajiban memberikan perencanaan umum, petunjuk-petunjuk serta biaya. Sedangkan perencanaan lebih rinci, khusus mengenai pengawasan dari kegiatan tersebut dipercayakan kepada pejabat atau aparatur pemerintah pusat yang ada di daerah. Tahun 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan memperoleh tugas pembantuan yang penyaluran anggarannya langsung dari DIPA pemerintah pusat, Tugas pembantuan DIPA pemerintah pusat yang hanya fokus pada Pembentukan Desa Tangguh.

3.1.1 Target Kinerja

Dari Badan Nasional Bencana Daerah:

Dasar Pelaksanaan	:	DIPA-103.01.1.648521/2021 tanggal 16 November 2020
Total Anggaran	:	607.758.000
Realisasi	:	570.310.000
Kegiatan	:	Pembentukan Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana

1. **Pembentukan Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana**

KEGIATAN	TARGET	KETERANGAN
Pembentukan Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana	20 Desa	• Kecamatan Laren (10 Desa) 1. Desa Tamanprijek 2. Desa Karangwungulor 3. Desa Karangtawar 4. Desa Gempangsejati 5. Desa Godog 6. Desa Pesanggrahan 7. Desa Siser 8. Desa Gelap 9. Desa Dateng

		10. Desa Tejoasri • Kecamatan Maduran (6 Desa) 1. Desa Duriwetan 2. Desa Gedangan 3. Desa Siwuran 4. Desa Blumbang 5. Desa Jangkungsomo 6. Desa Klagensrampat • Kecamatan Karanggeneng (1 Desa) 1. Desa Kaligerman • Kecamatan Karangbinangun (5 Desa) 1. Desa Waruk 2. Desa Banyuurip 3. Desa Banjarejo 4. Desa Somowinangun 5. Desa Ketapangtelu

3.1.2 Realisasi Tugas Pembantuan

No	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN(TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN kEGIATAN	%	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	**Badan Nasional Penanggulangan Bencana**	Peraturan Kepala Badan Nasional Penaggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana	Pembentukan Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana	**20 Desa Yaitu:** **Kecamatan Laren (10 Desa)** Desa Tamanprijek Desa Karangwungulor Desa Karangtawar Desa Gempangsejati Desa Godog Desa Pesanggrahan Desa Siser Desa Gelap Desa Dateng Desa Tejoasri **Kecamatan Maduran (6 Desa)** Desa Duriwetan Desa Gedangan Desa Siwuran Desa Blumbang Desa Jangkungsomo Desa Klagensrampat **Kecamatan Karanggeneng (1 Desa)** Desa Kaligerman Kecamatan **Karangbinangun (5 Desa)** Desa Waruk Desa Banyuurip Desa Banjarejo Desa Somowinangun Desa Ketapangtelu	BPBD KAB.LAMONGAN	607.758.000	570.310.000		**20 Desa Yaitu:** **Kecamatan Laren (10 Desa)** Desa Tamanprijek Desa Karangwungulor Desa Karangtawar Desa Gempangsejati Desa Godog Desa Pesanggrahan Desa Siser Desa Gelap Desa Dateng Desa Tejoasri **Kecamatan Maduran (6 Desa)** Desa Duriwetan Desa Gedangan Desa Siwuran Desa Blumbang Desa Jangkungsomo Desa Klagensrampat **Kecamatan Karanggeneng (1 Desa)** Desa Kaligerman Kecamatan **Karangbinangun (5 Desa)** Desa Waruk Desa Banyuurip Desa Banjarejo Desa Somowinangun Desa Ketapangtelu	**100 %**	

3.3 Permasalahan dan Kendala

1. Desa penerima program destana 2021 tidak semua berada di sekitaran bantaran sungai bengawan solo
2. kepala desa kurang dalam pemahaman program ekspedisi destana
3. Kesulitan dalam perekrutan fasdes karena keterbatasan waktu
4. Keterbatasaan ketersediaan sdm dalam penjaringan fasdes
5. Kurangnya kemampuan sdm (fasda dan fasdes) dalam pemahaman tentang mekanisme desa tangguh
6. Kurangnya antusiasme masyarakat desa
7. Kurangnya koordinasi antara fasda, fasdes dan pemeritahan desa
8. Kurangnya kerjasama antara fasdes dan pemerintahan desa sehingga kesulitan pemenuhan data

3.4 Saran dan Tindak Lanjut

1. Melakukan koordinasi dengan bnpb tentang desa penerima program
2. Melakukan upaya pemahaman tentang pentingnya resiko bencana ke desa
3. Memaksimalkan penjaringan dan penseleksian sdm di desa khususnya fasdes
4. Memotivasi dan memahamkan masyarakat khususnya kepala desa tentang resiko bencana
5. Memaksimalkan penseleksian fasdes supaya kegiatan terlaksana sesuai dengan targed capaian yg direncanakan
6. Mengkolaborasi kepala desa dan fasdes sehingga bisa bekerjasama dan saling mendukung
7. Menjembatani pemerintahan desa dan penyelengara kegiatan destana (fasda dan fasdes) sehingga terjadi kolaborasi pelaksanaan dengan baik
8. Terpetakannya desa rawan bencana dan potensi bencana
9. Tersusunnya rencana aksi desa
10. Terbentuknya forum dan relawan desa
11. Pemetaan desa tangguh bencana kabupaten
12. Memaksimalkan kegiatan pengurangan resiko bencana desa
13. Memaksimalkan potensi forum dan relawan terhadap bencana
14. Mengaktifkan desa tangguh bencana yg sudah terbentuk dengan kegiatan sapa destana

BAB IV
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Penerapan Standar Pelayanan Minimal dilakukan berdasarkan SPM yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian atau Lembaga Pemerintahan Non Departemen (LPND).

Penetapan rencana penerapan SPM dalam rangka mengiterpretasikan peraturan terkait dan untuk lebih memperkuat bahwa indikator didalam SPM dijalankan oleh Perangkat Daerah secara konsisten dan efektif.

Pemerintah daerah dalam rangka penguatan penyelenggaraan penanggulangan bencana ke depan diharap melakukan langkah-langkah berikut:

a. Menyusun regulasi/kebijakan tentang penanggulangan bencana di daerah dalam bentuk perda dan perkada yang berdimensi PRB atau bentuk kebijakan lainnya sesuai peruu.
b. Menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
c. Menyusun dokumen teknis kebencanaan (kajian risiko bencana, rencana penanggulangan bencana dan rencana kontijensi) sebagaidokumen dasar yang secara ilmiah menjelaskan mengenai nilai ancaman bencana, nilai kerentanan dan nilai kapasitas yang akan menjadi landasan untuk memilih strategi PRB serta menjadi dasar daerah untuk menyusun kebijakan penanggulangan bencana.
d. Menginisiasi kerjasama daerah yang berbatasan dalam penanggulangan bencana.

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan minimal yang sesuai dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Lamonganyaitu:

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
a. Pelayanan Informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap Tahun
b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap Tahun
c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap Tahun

4.1.2 Target Pencapaian Oleh Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Bencana Daerah di Provinsi dan Kab/ Kota, maka jenis pelayanan dasarnya yaitu :

JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR
a. Pelayanan Informasi rawan bencana	a. Standar prosedur operasional penanggulangan bencana	Warga negara yantg berada di kawasan rawan bencana untuk jenis pelayanan dasar pelayanan informasi rawan bencana, Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, Pelayanan Pnyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	c. Standar sarpras penanggulangan bencana	
d. Pelayanan Pnyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	c. Standar peningkatan kapasitas perosnil/SDM Pelayanan warga negara yang berada dikawasan rawan bencana	

Berikut Target pencapaian SPM Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan :

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN
a. Pelayanan Informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%
b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%

4.1.3 Realisasi

Realisasi SPM jenis pelayanan dasar sub urusan Bencana Daerah Tahun 2020 tidak terlepas dari peran positif dari pemerintah daerah. Realisasi SPM berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal untuk Sub Urusan Bencana Daerah adalah sebagai berikut :

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN ANGKA	TARGET CAPAIAN	ANGKA CAPAIAN	CAPAIAN
a. Pelayanan Informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	588.635 Warga	100%	588.635 Warga	100%

b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagan terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	287.644 Warga	100%	287.644 Warga	100%
c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	391.516 Warga	100%	391.516 Warga	100%

Berikut capaian/realisasi dari pelayanan dasar sub urusan Bencana Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan :

		INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	**INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT**		
1		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana**			
			Target	**Realisasi**	**Capaian**
	1	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	1	1	100%

	2	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di Kawasan rawan bencana	22 Peta	22 Peta	100%
	3	Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	588.635 Warga	588.635 Warga	100%
	4	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	22 Desa	22 Desa	100%
	5	Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	100 rambu	100 rambu	100%
2		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**			
			Target	**Realisasi**	**Capaian**
	1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	287.644 Warga	287.644 Warga	100%
3		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**			
			Target	**Realisasi**	
	1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	391.516 Warga	391.516 Warga	100%
	2	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	391.516 Warga	391.516 Warga	100%
	3	Respon cepat darurat bencana	58 Kejadian	58 Kejadian	100%

	4	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	3 bulan	3 bulan	100%
	5	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	391.516 Warga	391.516 Warga	100%
	6	Respon cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis perioritas	1	1	100%

4.1.3 Alokasi Anggaran

Penyelenggaraan sub urusan Bencana Daerah sesuai dengan standar teknis mutu pelayanan dasar dibebankan pada anggaran APBD Kabupaten/Kota. Untuk menunjang pencapaian program sub bidang Bencana Daerah tahun 2020 anggaran yang dialokasikan yaitu sebagai berikut :

NO		**INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM**	**PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN**	
1		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**		
			Pagu	**Realisasi**
	1	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota	95.000.000	94.105.000
	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	10.000.000	0
2		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**		

			Pagu	Realisasi
	1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	-	Refocusing
	2	Penyusunan Rencana Kontijensi	-	Refocusing
	3	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	-	Refocusing
	4	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-
	5	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	20.000.000	19.022.000
	6	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	-	-
3		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**		
			Pagu	**Realisasi**
	1	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	-	-
	2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	15.000.000	14.883.000
	3	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	25.000.000	25.000.000
	4	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	10.000.000	10.000.000

4.1.4 Dukungan Personil

Personil yang terlibat dalam penerapan dan pencapaian SPM adalah 44 orang yang terdiri dari 21 orang PNS dan 23 orang Tenaga Kontrak.

4.1.5 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1. Belum adanya Rencana Kontijensi bencana Banjir, Longsor, Angin Puting Beliung dan Kekeringan
2. Kurangnya Koordinasi antara forum relawan di kabupaten lamongan sebagai penunujang penanganan darurat bencana
3. Masih kurangnya pengetahuan dan ketrampilan dalam masyarakat di daerah rawan bencana dalam penanggulangan bencana
4. Belum optimalnya pelatihan SPAB secara khusus di adakan di sekolah rawan bencana
5. Kurang kompetennya Anggota TRC
6. Kurang ketertiban dalam inventarisasi di gudang
7. Terbatasnya alokasi anggaran untuk pemulihan dan penataan kembali kerusakan akibat bencana baik dibidang fisik maupun non fisik
8. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antar instansi pemilik kewenangan di bidang teknis sehingga kurang cepat dalam penanganan
9. Belum adanya kajian menyeluruh kebutuhan pasca bencana sehingga kurang mempunyai dalam perencanaan
10. Terbatasnya kewenangan di bidang RR dengan mengacu pada permendagri Nomor 101 tentang SPM

b. Solusi

1. Perlu adanya Rencana Kontijensi bencana Banjir, Longsor, Angin Puting Beliung dan Kekeringan
2. Perlu diadakan pelatihan relawan sebagai koordinasi
3. Perlu diadakan pelatihan desa tangguh lebih banyak lagi
4. Perlu diadakan khusus untuk sekolah di wilayah rawan bencana
5. Perlu diadakan pelatihan penanganan darurat khusu anggota Tim TRC
6. Perlu diadakan pelatihan untuk petugas Gudang
7. Perlunya peningkatan alokasi anggaran untuk pemulihan dan penata kembali kerusakan akibat bencana
8. Perlunya rapat koordinasi dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan
9. Sedang di susunnya dokumen penyusunan kajian kebutuhan pasca bencana
10. Review Permendagri 101 tentang SPM

4.1.6 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan dijalankan segaris dengan Visi, Misi, Tujuan maupun Arah Kebijakan sebagai perwujudan pembangunan pemerintah daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021:

1) Program Penanggulangan Bencana
   A. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
      1. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota

2. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Perjenis Bencana)

B. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
2. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
3. Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
4. Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota
5. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat(TRC) Bencana Kabupaten/Kota

C. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

1. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
2. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
3. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
4. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

D. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

1. Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota

`

BAB IX
PENUTUP

Sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan sebagai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dibidang Bencana

Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dengan prinsip-prinsip penganggaran yakni efektif dan efesien.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)Tahun 2021, dan semoga dapat dijadikan pedoman pemerintahan daerah dan pusat.

Lamongan, Februari 2022

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

GUNADI, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650403 198603 1 030

Dipindai dengan CamScanner